

RINGKASAN

Terorisme menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa ini, pemerintah berupaya mencari cara-cara terbaik untuk menanggulangnya. Deradikalisasi adalah sebuah program dengan tujuan yang beragam, dengan berpusat pada penanggulangan masalah terorisme secara keseluruhan. Beberapa hal, seperti melakukan *counter-terrorism*, mencegah proses radikalisme, mencegah provokasi, penyebaran kebencian, dan permusuhan antar umat beragama, mencegah masyarakat dari indoktrinasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham teror, serta memperkaya khazanah atas perbandingan paham-paham yang berbeda, adalah bagian dari program deradikalisasi. Tujuan penelitian ini yaitu efektivitas program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Lapas *High Risk* kelas II A Karanganya dan hambatan yang dihadapi Lapas *High Risk* kelas II A Karanganyar dalam menjalankan program deradikalisasi. Metode penelitian ini yaitu Yuridis sosiologis, suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variable penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Pembinaan narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan high risk Kelas II A Karanganyar tidak efektif di laksanakan. Karena belum berhasil merubah sikap ideologi dari radikal menjadi tidak radikal dengan indikator narapidana teroris tersebut membuat pernyataan ikrar setia kepada NKRI. Hambatan realita dilapangan Sumber Daya Manusia (SDM) rata-rata tidak sesuai dengan kompetensi pelaksana yang di perlukan dalam pembinaan Napiter disamping itu jumlah Pembina Napiter sangat sedikit dengan skala satu Pembina bertugas membina sepuluh Napiter. BNPT sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penanggulangan Terorisme yang melaksanakan Program peningkatan sumber daya manusia Petugas pemasyarakatan, Masih kurang dalam memberikan pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis penanganan terorisme, BNPT melakukan kunjungan tiga bulan atau bahkan enam bulan sekali hal ini dirasa terlalu lama.

SUMMARY

Terrorism is one of the big problems facing this nation, the government is trying to find the best ways to overcome it. Deradicalization is a program with diverse objectives, centered on overcoming the problem of terrorism as a whole. Several things, such as carrying out counter-terrorism, preventing the process of radicalism, preventing provocation, the spread of hatred and enmity between religious communities, preventing people from indoctrination, increasing people's knowledge to reject terrorism, and enriching the treasures of comparing different understandings, are part of the deradicalization program. The aim of this research is the effectiveness of the deradicalization program for terrorism convicts in the Karanganyar class II A High Risk prison and the obstacles faced by the Karanganyar class II A High Risk prison in carrying out the deradicalization program. This research method is sociological juridical, an approach based on binding norms or regulations, so it is hoped that this approach can show how law, which is empirically a symptom of society, can be studied as a causal variable that gives rise to effects on various aspects of social life. . The development of terrorism convicts at the Class II A Karanganyar high risk correctional institution is not being carried out effectively. Because they have not succeeded in changing their ideological attitude from radical to non-radical with the indicator that the terrorist convict made a statement pledging allegiance to the Republic of Indonesia. The reality of obstacles in the field is that Human Resources (HR) on average do not match the implementing competencies needed in developing Napiter, besides that the number of Napiter coaches is very small, with one coach being tasked with developing ten Napiters. BNPT, as the agency responsible for countering terrorism, carries out a program to improve human resources for correctional officers. It is still lacking in providing training, education and technical guidance for handling terrorism. BNPT makes visits every three months or even six months, which is considered too long.